

**RENCANA KERJA
(RENJA)**

**DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG**

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
JL. Gatot Subroto No. 35 Pemalang
2020



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2018-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 34 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Rencana Kerja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah dan dijadikan dasar untuk penyusunan program dan kegiatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 serta sebagai acuan bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam penyesuaian target kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang

pada tanggal 4 Agustus 2020



Di undangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 39

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 39 TAHUN 2020
TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH YANG DITETAPKAN

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah raga
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Tenaga Kerja
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16. Dinas Perhubungan
17. Dinas Lingkungan Hidup
18. Dinas Pertanian
19. Dinas Perikanan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
21. Satuan Polisi Pamong Praja
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
23. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
24. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
25. Badan Kepegawaian Daerah
26. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
28. Kecamatan Pemalang
29. Kecamatan Taman
30. Kecamatan Petarukan
31. Kecamatan Ampelgading
32. Kecamatan Comal
33. Kecamatan Ulujami
34. Kecamatan Bodeh
35. Kecamatan Bantarbolang
36. Kecamatan Randudongkal
37. Kecamatan Moga
38. Kecamatan Warungpring
39. Kecamatan Pulosari
40. Kecamatan Watukumpul
41. Kecamatan Belik



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG NO : 050/ /2020 TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021.	1
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	34
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	24
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	40
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	58
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah	58
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang	60
3.3. Program dan Kegiatan	63
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	87
BAB IV PENUTUP	105



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS TENAGA KERJA**

**PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 050 /114/ 12020**

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG**

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- b. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021 merupakan landasan operasional bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

Mengingat

- :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

Pasal 1

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan tahunan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2020 yang memuat Rencana Kegiatan Pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulasi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan satu tahun ke depan.

Pasal 2

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan;
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU berisi tentang :

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah ;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN dan SASARAN berisi tentang :

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD;
- 3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV :RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Pasal 3

Isi, Uraian dan perincian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 18 Agustus 2020

**KEPALA TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG**



Drs. MU'MINUN, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19680526 199403 1 005

Lampiran :Peraturan Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pematang
Nomor : 050/ 114 / 2020
Tanggal : 18 Agustus 2020

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan sebagai proses awal dari tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan mensyaratkan adanya perumusan alternatif keputusan yang cepat, tepat dan akuntabel. Kegiatan ini menjadi proses yang dibutuhkan karena keberhasilan dalam pencapaian tujuan pembangunan sangat bergantung kepada kualitas konsep perencanaan yang dilakukan. Dengan demikian sejauhmana ketersediaan sumber dana dan sumber daya aparatur dapat digunakan dalam mendukung program dan kegiatan dapat diprediksikan melalui asumsi yang mendasari konsepsi perencanaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Tatacara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, **Rencana Kerja (Renja) SKPD** adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan dalam Pasal 273 ayat (2),(3),(4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan dalam Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), rencana kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan.

Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif. Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra). Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja OPD merupakan salah satu tahapan untuk menentukan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dokumen ini merupakan konsepsi perencanaan pembangunan yang berpedoman pada Renstra OPD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah .

Tahun 2021 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Oleh karena hal tersebut, dasar penyusunan Renja ini adalah visi dan misi Bupati Pematang Siantar. Adapun Visi Bupati Pematang Siantar adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pemalang Hebat yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan Sejahtera.”

Sedangkan Misi Bupati Pemalang antara lain :

- a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak;
- c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- d. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah;
- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan saling menghormati;
- f. Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah;
- g. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat.

1.2. Landasan Hukum :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Pemalang Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang disusun sebagai acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam menyusun program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Oleh karena itu Renja yang ada pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dimaksudkan untuk:

1. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
2. menyediakan acuan resmi bagi Dinas Tenaga Kerja dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terarah, terpadu dan terukur selama 1 tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran Aparatur Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional dalam 1 tahun.

Sedangkan tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Untuk mengukur capaian target kinerja pelayanan PD;
2. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang;
3. Menciptakan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja;

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

berisi tentang :Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

berisi tentang : Evaluasi Pelaksanaan Renja Perabgkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,Review

terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- BAB III : TUJUAN dan SASARAN
berisi tentang : Telahaan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah.
Tujuan dan Sasaran Renja OPD, Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019, capaian Rencana Kerja tahun 2020 (tahun n-1) dan capaian target Renstra Dinas Tenaga Kerja, pada urusan wajib non pelayanan dasar Tenaga Kerja dan Urusan Pilihan Ketransmigrasian. Realisasi program/kegiatan tahun 2019 yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang sebagai dokumen perencanaan disusun selama 1 tahun anggaran merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada akhir tahun anggaran, setiap OPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya. Dari hasil evaluasi rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang berpedoman pada Renstra Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2016-2021, bahwa pada Tahun 2019, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapat alokasi anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 9.681.624.000,- yang terdiri dari 2 urusan, 10 Program dan 60 kegiatan. Pada tahun 2019 dari jumlah anggaran yang ada telah terserap sebesar Rp.9.197.305.901,-(95%) Sisa anggaran sebesar Rp. 454.846.435,-(5%) berupa **sisa pengadaan barang jasa dan efisiensi anggaran**. Prosentase capaian yang mencapai 95 % tersebut menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan urusan wajib non pelayanan dasar tenaga kerja dan urusan pilihan ketransmigrasian telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Sedangkan untuk tahun anggaran 2020, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 6.954.403.000,-. Dengan adanya wabah Covid 19, dilakukan rasionalisasi anggaran untuk penanganan wabah covid 19. Untuk alokasi anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang mengalami rasionalisasi sebanyak 2 kali.

1. Rasionalisasi tahap pertama sebesar Rp. 350.000.000,- sedangkan
2. Rasionalisasi tahap kedua sebesar Rp.2.480.598.500,-

Dan mendapat tambahan anggaran DBHCHT sebesar Rp. 300.000.000,-
 Sehingga total anggaran Disnaker untuk tahun 2020 menjadi sebesar
 Rp. 4.063.805.000,-

Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2019

1. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2019	
		K	Rp.
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	96,15
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	87,73
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	96,99
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100	100
5.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	100	98,12
6.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	100	98,74
7.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100	97,64
8.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	100	98,61

2. Urusan Pilihan Ketramigrasian

No.	Program/Kegiatan	% realisasi capaian kinerja dan anggaran RKPD 2018	
		K	Rp.
1.	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	100	89,52
2.	Program Transmigrasi umum	100	99,05

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang**

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
	Urusan Wajib										
	Ketenagakerjaan										
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi perkantoran untuk meningkatkan kinerja terhadap kebutuhan								
01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah surat yang terkirim dengan baik dengan jumlah surat masuk (surat/notdin)	12.500 surat, 3 org	2.500 org, 6 org	2.500 org, 5 org	2.500 org, 5 org	100	2.500 org, 5 org, 12 bulan	1989 org, 5 org, 12 bulan	79,56

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik (3 jenis=12 bulan)	60 bulan (3jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	12 bulan (3 jenis)	100	10 bulan (3 jenis)	3 bulan (3 jenis)	30
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (60 peralatan = 12 bulan)	290 peralt	60 peralatan	48 peralatan	48 peralatan	100	126 peralatan	38 peralatan	30,15
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas . Operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara (48=12 bulan)	234 unit/60 bln	34 unit	37 unit	37 unit	100	39 unit	22 unit	56,41
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi (3 orang=12 bulan)	24 org/60 bln	6 org (12 bulan)	5 org (12 bulan), 1 paket	5 org (12 bulan), 1 paket	100	5org (12 bulan), 1 paket	5org (3 bulan), 1 paket	30

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	5 paket/60 bln	1 paket/12 bulan	1 paket/12 bulan	1 paket/12 bulan	100	1 paket/12 bulan	1 paket/3 bulan	30
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia	50 buah spanduk, 45 jenis, 99.350 lembar/60 bln	10 spanduk, 22.500 lbr, 8 jenis/ 12 bulan	60 spanduk, 22.500 lbr, 9 jenis/ 12 bulan	60 spanduk, 22.500 lbr, 9 jenis/ 12 bulan	100	15spanduk, 15.000 lbr, 6 jenis/ 12 bulan	3 spanduk, 3.800 lbr	25
	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia	50 jenis/2.916 buah/60 bln	10 jenis/228 buah	6 jenis/276 buah	6 jenis/276 buah	100	6 jenis/373 buah	5 jenis/140 buah	37,5
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	25 jenis	4 jenis	6 jenis,9 bh	6 jenis,9 bh	100	1 jenis, 2 buah	0	0
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi	5 paket/60 bln	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	1 paket	1 paket	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14.400 eks/30 bk/60 bln	2.080 eks Koran dan 8 buah buku	2.150 eks Koran dan 2 buah buku	2.150 eks Koran dan 2 buah buku	100	1.900 eks Koran dan 2 buah buku	474 Koran	25
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan	165 unit/60 bln	25 tabung	42 tabung	42 tabung	100	32 tabung	7 tabung	21,8
	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	12.900 dus/525 galon/2.800 kg,250 pak/60 bln	2.200 dus, 105 galon, 561 kg, 50 pak	3.101 dus, 155 galon, 450 kg, 250 pak	3.101 dus, 155 galon, 450 kg, 250 pak	100	1.260 dus, 30 galon, 365 kg, 195 pak	260 dus, 26 galon, 90kg, 52 pak	20,6
	Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri	330 kali/60 bln	75 kali	85 kali	85 kali	100	70 kali	58 kali	82
	Penyediaan jasa keamanan	jumlah tenaga keamanan	66 org/60 bln	6 org, 12 bulan	4 org, 12 bulan	4 org, 12 bulan	100	4 org, 12 bulan	4 org, 3 bulan	30

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		yang terpenuhi								
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	meningkatkan sarana prasarana aparatur untuk menunjang peningkatan kinerja terhadap kebutuhan								
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terbangun	11 unit	4 unit, 4 ded	4 unit, 4 ded	4 unit, 4 ded		2 gedung, 2 ded	-	0
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	17 unit	2 unit	-	-	100	-	-	0
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat terpenuhi	23 jenis	4 jenis	-	-	100	2 jenis, 8 unit	-	0
	Pengadaan mebeleur	jumlah mebeleur yang tersedia	16 jenis	2 jenis	-	-	100	4 enis, 20 unit	-	0
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	12 jenis	-	-	-	100			0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	jumlah komputer dan perlengkapannya yang tersedia	15 jenis	5 jenis	5 jenis, 7 unt, 2 buah	5 jenis, 7 unt, 2 buah	100	12	0	0
	Pengadaan Alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang terpenuhi	25 jenis	3 jenis	-	-	-	-	0	0
	Pengadaan Lemari Besi dan Felling kabinet	Jumlah lemari besi dan felling kabinet yang terpenuhi	40 unit	-	-	-	-	4 unit	0	0
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung yang terpelihara	14 lokasi/60 bln	3 lokasi	3 lokasi	3 lokasi. 3 gedung	100	3 lokasi	2 lokasi	66
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	172 unit/60 bulan	30 unit	41 unit	41 unit	100	40 unit	36 unit	90
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	86 unit/60 bln	-	-	-	-	-	-	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		selama 12 bulan								
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah prasarana BLK yang dipelihara (3 peralatan)	17 unit/60 bln	12 unit	12 peralatan	12 peralatan	100	10 peralatan	4 peralatan	40
	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	21 unit/60 bln	-	-	-	-	-		0
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	60 bln	9 bln	12 bln, 30 unit	12 bln, 30 unit	100	12 bulan, 30 unit	3 bulan, 10 unit	30
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kerja	Jumlah prasarana BLK yang tersedia	19 unit	4 peralatan kejuruan	4 peralatan kejuruan	4 peralatan kejuruan	100	4 peralatan kejuruan	4 peralatan kejuruan	100

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	jumlah gedung induk transito, gudang bencana, BLK yang direhab	18 unit/lokasi	3 unit	2 lokasi, 8 unit	2 lokasi, 8 unit	100	1 lokasi, 1 unit	-	0
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur								
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	jumlah peserta sosialisasi	250 org	89 org	92 org	92 org	100	40 peserta	40 peserta	100
	Bimbingan teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah bimtek yang diikuti (12 kali)	52 kali	10 kali	8 kali, 4 calon instruktur	8 kali, 4 calon instruktur	100	10 kali, 4 calon instruktur	0	0
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		lima tahunan								
	Penyusunan Laporan kinerja dan Ikhtisar kinerja SKPD	jumlah laporan yang dihasilkan	15 lap	3 lap/20 buku	4 lap/20 buku	4 laporan/20 buku	100	3 laporan	2 laporan	66
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun dengan baik dan benar	5 lap	1 lap/5 buku	1 lap/5 buku	1 lap/5 buku	100	1 laporan	0	0
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun dengan baik dan benar	5 lap	1 lap/5 buku	1 lap/5 buku	1 lap/5 buku	100	1 laporan	0	0
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan yang dihasilkan	60 lap	Lap/2 buku	4 Lap	4 Lap	100	5 laporan	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Terwujudnya peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD								
	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersedianya database perencanaan	1 dokmn	2 dokmn, 1 kegt bimtek, 1 apliks, 16 buku	2 dokmn, 1 kegt bimtek, 1 apliks, 16 buku	-	100	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	30 dokmn	6 dokmn/70 buku	5 laporan , 3 kegt	5 laporan , 3 kegt	100	6	0	0
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja								
	Penyusunan Data base Tenaga Kerja	tersedianya database	4 dokmn	-	-	-	100			0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Daerah	tenaga kerja daerah								
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLK	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK (35 orang)	190 tenaga/instruktur LPKS	40 tenaga/instruktur LPKS	38 tenaga/instruktur LPKS	38 tenaga/instruktur LPKS	100	0	0	0
	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang tersedia	80 bh		-	-	100	-	0	0
	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja	jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan kerja (495 orang)	1.560 peserta	320 peserta, 4 instruktur	320 peserta, 8 instruktur	320 peserta, 8 instruktur	100	340 peserta, 10 tenaga kepelatihan	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah prasarana BLK yang dibutuhkan (111 buah)	5 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100	2 paket	0	0
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah aporan monev yang tersusun	12 laporan			-		0	0	0
	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas (20 orang)	100 org	20 tenaga	20 tenaga	-	100	0	0	0
	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang dilakukan penilaian kinerja	190 LPKS		38 LPKS	38 LPKS	100	0	0	0
	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja yang menyusun profil kelembagaan (35 LPKS)	190 LPKS		-	-	100	-	0	0
	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Jumlah peserta pemagangan ke luar negeri yang mengikuti bimbingan (40	125 org	50 peserta	50 peserta	-	100	-	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		orang)								
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	meningkatkan kesempatan kerja								
	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja	jumlah buku penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan (222 buku)	80 buku		-	-	100	-	0	0
	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebar (35 jenis)	3.875 jenis	45 jenis, 1 paket ISO, 1 paket job fair	45 jenis, 1 paket ISO, 1 paket job fair	45 jenis, 1 paket ISO, 1 paket job fair	100	45 jenis, 1 paket ISO dan 1 paket job fair,	0	0
	Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapat penyuluhan dan bimbingan	17.500 siswa	700 siswa	1.600 siswa	1.600 siswa	100	1.200 siswa	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tes leader								
	Pengembangan kelembagaan produktifitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	120 pokman		25 peserta	25 peserta	100	25 peserta	25 peserta	100
	Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pandanaan pelatihan berbasis masyarakat	terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	1.556 org	160 org	260 org	260 org	100	260 orang	0	0
	Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah	Tersusunnya pengembangan rencana tenaga kerja daerah	3 dokmn	-	1 dokmn	1 dokmn	100	1 dokumen	-	0
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah aporan money yang	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100			

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		tersusun								
	Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat	terwujudnya kesempatan kerja yang tersedia	15.740	2.160 HOk	2.160 HOk	2.160 HOk	100	2.112 HOK	0	0
	Pendampingan, Pengelolaan unit Bursa Kerja Khusus	Prosentase tercapainya bimtek Bursa Kerja khusus (BKK)	420 org	50 org	80 org	80 org	100	60 orang	0	0
	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	245 org	240 org, 1paket pos TKI	3 keg	3 keg	100	3 kegt	0	0
	pendataan angkatan kerja							1 kegt	0	0
	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang dibina	60 lembaga		20 LPKS, 50 BKK, 60 Laporan	20 LPKS, 50 BKK, 60 Laporan	100	30 LPKS, 60 BKK	0	0
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Perselisihan Hubungan Industrial	jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan 4 kasus	29 kasus	6 kasus perselisihan/pecegahan	6 kasus perselisihan/pecegahan	6 kasus perselisihan/pecegahan	100	4 kasus perselisihan/pecegahan	2 kasus	50
	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	jumlah permasalahan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 2 kasus	18 kasus	4 kasus	3 kasus	3 kasus	100	3 kasus	0	0
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi UMK, Jamsostek, Norma Kerja dan	420 org	200 org	200 org	200 org	100	110 orang	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Penempatan TKI ke Luar Negeri								
	Peningkatan Pengawasan perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) / (UMK/THR)	Perusahaan dan tenaga kerja yang dilakukan pemeriksaan	100	-	-	-	100	-		0
	Pemberdayaan LKS Tripartit	Jumlah survey KHL dan rapat LKS Tripartit	30 kali	6 kali, 10 kali, 12 kali, 6 kali/ 14 kecamatan dan 1 kecamatan	4 kali, 20 perush, 15 persh, 12 kec, 1 kali	4 kali, 20 perush, 15 persh, 12 kec, 1 kali	100	5 kali, 10 perush, 20 perush, 12 kecmtn, dan 1 kali	1 kali, 10 perush, 4 kec	20
	Pembinaan dan Pemantauan kinerja Organisasi	Jumlah SP/SB yang tercatat dibandingkan dengan jumlah seluruh 14 SP/SB	71 SP/SB	14 SP/SB	14 SP/SB	14 SP/SB	100	14 SP/SB	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembinaan pembuatan dan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Prosentase jumlah perusahaan yang dibina untuk pembuaan dan pembentukan sarana HI (PP,PKB,SP,k opkar dan LK Bipartit) (6 PP/PKB/LKS)	42 PP/PKB/LK S Bi partit	10 PP/PKB, 2 LKS bi partit, 9 perusahaan	10 PK, 4 PP/PKB, 5 LKS Bipartit, 10 perush	10 PK, 4 PP/PKB, 5 LKS Bipartit, 10 perush	100	10 PK, 2 PP / 5 PKB, 10 LKS Biprtit	10 PK	37
	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah perusahaan yang menggunakan tenaga outsourcing yang dibina dan didata (22perusahaan)	140 perush	20 perusahaan	20 perusahaan	20 perusahaan	100	3 perusahaan	0	0
	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	Jumlah survey KHL dan rapat	50 kali/30 kali	6 kali, 2 kegt	6 kali, 2 kali, 1 kali	6 kali, 2 kali, 1 kali	100	6 kali, 2 kali, 1 kali	1	11

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		dewan pengupahan dan studi banding								
	Program Pengembangan wilayah transmigrasi	Berkembangnya wilayah transmigrasi								
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan trans	Jumlah MoU pertahun	10 MOU	4 MOU	3 MOU	2 MOU	100	2 MOU	0	0
	Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah calon transmigran yang dikirim ke lokasi	120 KK	25 KK	32 KK/3 lokasi	36 KK	100	25 KK	0	0
	Program Trasmigrasi regional	berkembangnya wilayah transmigrasi								

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelatihan Transmigrasi Regional	Jumlah calon transmigran terdidik	200 org	50 org	25 org	36 peserta	100	25 org/KK	0	0
	Penyiapan database calon Transmigran	Jumlah animo calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi 14 kecamatan	550 KK	-	-		100	-		
	Seleksi Calon Transmigran	Jumlah calon transmigran yang di seleksi	140 KK	30 KK	31 KK	36 KK	100	25 org/KK	0	0
	Pembinaan transmigran pasca penempatan	jumlah kesiapan lokasi dan jumlah transmigran yang terfasilitasi	10 lokasi	2 lokasi	1 lokasi, 8 orang	1 lokasi	100	1 lokasi	0	0
	Pembinaan transmigran pra penempatan	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi	10 Lokasi	2 lokasi	2 lokasi	36 KK	100	0	0	0

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Ranc Renstra PD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja hasil (Program dan Keluaran Kegiatan) s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2020)	Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2019	Realisasi Renja SKPD Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran umum terhadap pelayanan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2019 dapat kami sajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Pematang Jaya

NO	Indikator	SPM / standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2020	Tahun 2021	
				(thn n-3)	(thn n-2)	(tnn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	6	7	8	8	8	9	10	11	12	13
1.	Prosentase tingkat pengangguran terbuka			7,03	7	6,93	6,87	6,87	6.5	-	6,93	6,87	
2.	Prosentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja			71,61	75,07	75,86	76,67	76,68	100,7	-	76,67	76,68	
3.	Jumlah LPK milik pemerintah, perusahaan dan milik swasta yang mendapat pembinaan			38	38	38	38	38	30	-	38	38	
4.	Prosentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja			55,49	57,96	61,33	66,20	76,66	100.7	-	66,20	76,66	
5	Angka perselisihan yang terfasilitasi dan terselesaikan			100	100	100	100	100	100	-	100	100	
6	Jumlah pekerja / buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan			52	54	56	58	60	68	-	58	60	
7	Tercapainya jumlah penempatan tenaga kerja (KK)			25	25	25	25	25	26	-	25	25	

Indikator prosentase tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 dari target 6,93 % tercapai 6,5 % (didapat dari jumlah pengangguran terbuka 41.354 dibagi Angkatan kerja 636.373 di kalikan 100) atau capaiannya tahun 2019 sebesar 106,2 %, sehingga capaian s/d 2019 terhadap target akhir Renstra 2021 sebesar 94,61 %.

Permasalahan yang dihadapi adalah :

Pencari kerja pemula lulusan SMA/SMK lebih memilih mencari pekerjaan ke luar daerah (Jabodetabek) sehingga lowongan kerja di perusahaan-perusahaan (terutama Garmen,Bulumata) masih kekurangan tenaga.

Solusi yang dilakukan adalah :

Secara rutin melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pencari kerja untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten Pematang Jaya.

Indikator ini didukung oleh Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja.

Sedangkan untuk indikator prosentase pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja pada tahun 2019 dari target 75,86 %, terealisasi 76,40% (Jumlah Peserta Pelatihan Kerja 340 yang ditempatkan 445), sehingga capaian s/d 2019 terhadap target akhir Renstra 2021 sebesar 97,10 %.

Indikator ini didukung oleh oleh Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja serta Pengadaan sarana dan prasarana BLK, pelatihan-pelatihan Las Listrik SMAW 3G,Menjahit pakaian, Otomotif Sepeda Motor, Prosesing/Tata Boga. Realisasi capaian kinerja melebihi target disebabkan karena tingginya minat peserta pelatihan untuk bekerja dan berwirausaha dan terbukanya lapangan kerja dan berusaha di Kabupaten Pematang Jaya

Dalam usaha mencapai sasaran kualitas instruktur lembaga pelatihan kerja ditetapkan indikator jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan ketrampilan Dari target yang ditetapkan 40 LPK terealisasi sebesar 40 LPK (100%).

Kegiatan yang mendukung indikator sasaran ini adalah peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK.

Upaya Peningkatan Penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri dari target tahun 2019 sebesar 61.33% terealisasi 61.77 % (Jumlah tenaga kerja yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 15.307 orang dan yang telah di tempatkan sebanyak 9.456 orang), sehingga capaian s/d 2019 terhadap target akhir 2021 sebesar 80,57 %. Indikator ini didukung oleh pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan seperti dengan

program peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan antara lain pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja, pelatihan-pelatihan ketrampilan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya dalam rangka menekan angka pengangguran adalah dengan program Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan kegiatan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Keahlian dan Instruktur BLK, Pendidikan dan pelatihan bagi pencari Kerja, Pengadaan sarana dan prasarana BLK, Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kerja, Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta, dan Program Peningkatan Kesempatan Kerja dengan kegiatan Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja Penyiapan Tenaga Kerja Siap pakai, Pemberian Fasilitas dan Mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat, Pelaksanaan Kegiatan Padat Kerja darurat, Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri.

Salah satu cara menekan tingkat pengangguran yang tinggi adalah dengan cara meningkatkan partisipasi angkatan kerja.

Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan:

1. Meningkatkan mutu tenaga kerja Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu tenaga kerja dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu bersaing dengan tenaga kerja luar negeri.
2. Memperluas kesempatan kerja Pemerintah berupaya untuk memperluas kesempatan kerja dengan cara : mendirikan industri atau pabrik yang bersifat padat karya, Mendorong usaha-usaha kecil menengah, Mengintensifkan pekerjaan di daerah pedesaan, Meningkatkan investasi (penanaman modal) asing
3. Memperluas pemerataan lapangan kerja Pemerintah mengoptimalkan informasi pemberitahuan lowongan kerja kepada para pencari kerja melalui pasar kerja. Dengan cara ini diharapkan pencari kerja mudah mendapatkan informasi lowongan pekerjaan.

4. Memperbaiki sistem pengupahan dengan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan dan teguran kepada pelaku usaha yang belum menerapkan UMK.

Dalam RPJMD Tahun 2016-2021 ditetapkan indikator angka sengketa pengusaha pekerja pertahun, pada tahun 2019 ditetapkan target sebesar 100% dan pada tahun 2018 angka sengketa terealisasi 100% (Penyelesaian kasus Bipatrit sebanyak 6 kasus.

Setiap pekerja mempunyai hak mendapatkan jaminan social tenaga kerja (jamsostek). Dari target 56% terealisasi 68% (Jumlah pekerja/buruh peserta sebesar 13.703 orang dibandingkan jumlah tenaga kerja sebesar 20.153 orang) . Apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2016-2021, pada tahun 2019 telah tercapai Kinerja 110,5 %.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial, fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan, pemberdayaan LKS tripartit, Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi, pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan.

Sedangkan selain mendapatkan jaminan sosial, pekerja juga berhak atas pekerjaan dan upah yang layak. Di tiap Kabupaten setiap tahun ditetapkan Upah Minimum Kabupaten disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak, untuk tahun 2019 Upah Minimum Kabupaten Pemalang di Tetapkan oleh gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 1.865.000,00.

Dalam bidang ketenagakerjaan permasalahan begitu luas dan kompleks tidak hanya masih adanya perusahaan yang belum memenuhi aturan ketenagakerjaan dan pelaku usaha yang belum menerapkan Upah Minimum Kabupaten, besarnya jumlah penganggur, terutama disebabkan rendahnya pendidikan dan ketrampilan, masih kurangnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, disamping itu tidak semua dapat dipenuhi dikarenakan kualifikasi tenaga kerja belum sesuai dengan permintaan, masih rendahnya tingkat ketrampilan tenaga kerja pada sisi lain kita masih menghadapi masalah belum optimalnya balai latihan kerja dan lembaga pelatihan kerja swasta serta terbatasnya instruktur yang bersertifikasi, belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial tenaga kerja. Adapun Cara melindungi buruh yaitu : melalui Undang-undang ketenagakerjaan dimana buruh akan terlindungi secara hukum mulai dari jaminann pekerjaan yang layak, jaminan kesehatan, keselamatan

kerja dan upah yang layak sampai jaminan sosial dan melalui serikat buruh/serikat pekerja.

Solusi yang dilakukan, melakukan sosialisasi dan pemahaman kepada pencari kerja untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten pemalang, dan pembinaan secara rutin terhadap perusahaan dan teguran kepada pelaku usaha yang belum menerapkan UMK.

Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini adalah Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dan pemberdayaan dewan pengupahan

Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuan transmigrasi adalah untuk mencapai persebaran penduduk yang lebih seimbang dan lebih merata diseluruh wilayah Indonesia.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang menargetkan, jumlah calon transmigrasi pada tahun 2019 berjumlah 25 KK, dan telah terealisasi penempatannya sejumlah 26 KK (104%). Apabila dibandingkan dengan target pada akhir Renstra 2016-2021, maka sampai tahun 2019 ini telah terealisasi 104%.

Permasalahan ketransmigrasian adalah :

Kuota calon transmigrasi yang menentukan jumlah dari pusat, sehingga banyak calon transmigrasi yang tertunda keberangkatannya.

Solusi yang dilakukan adalah :

Selalu berkoordinasi baik ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah maupun ke Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk menambah kuota calon transmigrasi asal Kabupaten Pemalang.

Program yang mendukung pencapaian indikator tersebut adalah Program Pengembangan wilayah transmigrasi dengan kegiatan Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi, Pengerahan dan fasilitas perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM dan Program Trasmigrasi regional dengan kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional Penyiapan database calon Transmigran, Seleksi Calon Transmigran, Pembinaan transmigran pasca penempatan, Pembinaan transmigran pra penempatan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi

Dalam bidang Ketenagakerjaan isu penting permasalahan yang ada antara lain :

1. Masih tingginya angka pengangguran;

Sedangkan permasalahan bidang **transmigrasi** antara lain :

1. Adanya pembatasan/kuota transmigran (ditentukan oleh Pusat);
2. Kurang optimalnya penyediaan lokasi penempatan dengan kesiapan daerah penempatan yang benar-benar sesuai kriteria;
3. Belum optimalnya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi;

Sesuai kondisi permasalahan diatas, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kualitas produktivitas pencari kerja, peluang kesempatan kerja, penciptaan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis didukung dengan pengawasan dalam penegakan supremasi hukum ketenagakerjaan di Kabupaten Pematang yang dianggap belum maksimal, juga berdasarkan isu-isu strategis maka perlu ditindaklanjuti dengan suatu rencana tindaklanjut berupa program dan kegiatan yang nyata yang didukung dengan penyiapan landasan-landasan teknis dan operasional secara bertahap dalam upaya pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang berkelanjutan disusunlah program-program sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Peningkatan kesempatan kerja.
3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Pengembangan wilayah transmigrasi
5. Transmigrasi umum.

2.4. Review terhadap Rancangan awal RKPD

Tahun 2020 merupakan tahun kelima pelaksanaan kinerja dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021 yang dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021. Dengan adanya RPJMD Kabupaten Pematang Tahun 2016-2021, diharapkan adanya konsistensi antar semua dokumen perencanaan.

Secara umum program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja sudah tertampung dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), termasuk usulan kegiatan yang berasal dari hasil musrenbang kecamatan

hanya tidak semua program dan kegiatan dapat terdani sesuai dengan usulan yang ada dalam rancangan awal RKPD.

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2016-2021, ada beberapa program prioritas dari Kepala Daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Program tersebut merupakan program prioritas yang sifatnya sangat strategis, dan untuk Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang program prioritasnya adalah Pengembangan Balai Latihan Kerja . Untuk Review Rancangan RKPD dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kabupaten Pematang Jaya

Nama OPD : Dinas Tenaga Kerja Kab. Pematang Jaya

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DINAS TENAGA KERJA				12.552.751.000					14.387.751.000
	<u>Ketenagakerjaan</u>				11.867.001.000	<u>Ketenagakerjaan</u>				13.702.001.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnaker	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	1.243.000.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Disnaker	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	12 bulan	1.943.000.000
	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnaker	Jumlah surat terkirim selama 12 bulan	12 bulan	88.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Disnaker	jumlah surat terkirim selama 12 bulan	12 bulan	88.000.000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnaker	Jumlah taguhan telepon,air, listrik selama 12 bulan	12 bulan	200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Disnaker	jumlah tagihan telepon,air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	200.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	12 bulan	25.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	12 bulan	25.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disnaker	jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Disnaker	Jumlah yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20.000.000
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnaker	jumlah laporan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	30.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Disnaker	jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	30.000.000
Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnaker	jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bulan	90.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Disnaker	jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bulan	90.000.000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disnaker	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Disnaker	jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15.000.000
Penyediaan alat tulis kantor	Disnaker	jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	50.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Disnaker	jumlah alat kantor yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	50.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnaker	jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	35.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Disnaker	jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	35.000.000
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disnaker	jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	20.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disnaker	jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	20.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	5 jenis	130.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Disnaker	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	5 jenis	130.000.000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Disnaker	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	20.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Disnaker	jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	12 bulan	20.000.000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	15.000.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	15.000.000

Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	35 tabung	10.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Disnaker	jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	35 tabung	10.000.000
Penyediaan makanan dan minuman	Disnaker	jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	75.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Disnaker	jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	12 bulan	75.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Disnaker	di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	70 kali	300.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Disnaker	jumlah rapat dan konsultasi yan dapat dihadiri/diikuti	70 kali	400.000.000
Penyediaan Jasa Keamanan	Disnaker	jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	12 bulan	120.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Disnaker	jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	12 bulan	120.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disnaker	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	3.046.501.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Disnaker	terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan	12 bulan	3.046.501.000
Pembangunan gedung kantor	Disnaker	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	1.751.501.000	Pembangunan gedung kantor	Disnaker	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	1.751.501.000
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Disnaker	jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang tersedia	3 unit	100.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Disnaker	jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	1 unit	100.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disnaker	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 jenis	50.000.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Disnaker	jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	4 unit	50.000.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Disnaker	jumlah peralatan gedung yang dipelihara selama 12 bulan	3 jenis	40.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Disnaker	jumlah peralatan gedung yang terpenuhi	3 jenis	40.000.000

Pengadaan mebeleur	Disnaker	jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100.000.000	Pengadaan mebeleur	Disnaker	jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100.000.000
Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Disnaker	jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Disnaker	jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100.000.000
Pengadaan alat- alat elektronik	Disnaker	jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 jenis	50.000.000	Pengadaan alat- alat elektronik	Disnaker	jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	4 jenis	40.000.000
Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Disnaker	jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang terpenuhi	8 unit	40.000.000	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Disnaker	jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang terpenuhi	8 unit	40.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disnaker	jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disnaker	jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnaker	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara selama 12 bulan	48 unit	120.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disnaker	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 12 bulan	48 unit	120.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disnaker	jumlah perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	10.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Disnaker	jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	10.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disnaker	jumlah peralatan gedung BLK yang dipelihara selama 12 bulan	3 lokasi	25.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Disnaker	jumlah prasarana gedung BLK yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	25.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disnaker	jumlah mebeleur yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Disnaker	jumlah mebeleur yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	5.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Disnaker	jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Disnaker	jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	20.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Disnaker	jumlah alat-alat elektronik yg membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	20.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Disnaker	jumlah alat-alat elektronik yg dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	20.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Disnaker	jumlah prasarana BLK yang terpelihara selama 12 bulan	4 buah	30.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Disnaker	jumlah prasarana BLK yang terpelihara selama 12 bulan	4 buah	30.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feling cabinet	Disnaker	jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	5.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feling cabinet	Disnaker	jumlah lemari besi dan feeling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	5.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnaker	jumlah gedung yang direhap	3 lokasi	500.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disnaker	jumlah gedung yang direhab	3 lokasi	500.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur	Disnaker	Tingkat kedisiplinan ASN	50 stel	75.000.000	Program peningkatan disiplin aparatur	Disnaker	Posentase tingkat kedisiplinan ASN	100%	75.000.000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Disnaker	jumlah pakain dinas yang terpenuhi	50 stel	25.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Disnaker	jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	50 stel	25.000.000
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Disnaker	jumlah pakaian kerja yang tersedia	50 stel	25.000.000	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Disnaker	jumlah pakaian kerja yang tersedia	50 stel	25.000.000
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disnaker	jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	50 stel	25.000.000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Disnaker	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	50 stel	25.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disnaker	prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	100,00%	112.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Disnaker	Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN	100%	112.500.000
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	82.500.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 orang	82.500.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah bimtek yang diikuti dan pelatihan	10 kali	30.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Disnaker	jumlah bimtek yang diikuti dan pelatihan	10 kali	30.000.000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia		100 dokumen	145.000.000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	60%	
	Disnaker						Disnaker			150.000.000
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnaker	jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 dokumen		75.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disnaker	jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 laporan	75.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disnaker	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	3 dokumen		10.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Disnaker	jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	10.000.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnaker	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 dokumen		10.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Disnaker	jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 dokumen	10.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	jumlah laporan monev yang tersusun	12 dokumen		50.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	jumlah laporan monev yang tersusun	12 laporan	50.000.000
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Prosentase jenis dokumen perencanaan an penganggaran yang tersedia		100 dokumen	75.000.000	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD		Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100 dokumen	
	Disnaker						Disnaker			80.000.000
Penyusunan data base perencanaan SKPD	Disnaker	tersedianya data perencanaan	1 dokumen		-	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Disnaker	tersedianya data perencanaan	1 dokumen	-
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Disnaker	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	6 dokumen		80.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD		jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	6 dokumen	80.000.000
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja					1.970.000.000	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas				2.530.000.000
	Disnaker						Disnaker			

		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,	76.67%		Tenaga Kerja		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi,	76,68%	
Penyusunan data base tenaga kerja daerah.	Disnaker	tersedianya data base tenaga kerja daerah	1 dokumen	-		Disnaker			
Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Disnaker	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	40 orang	90.000.000	Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Disnaker	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	40 orang	90.000.000
Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Disnaker	jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang dapat disediakan	20 buah	25.000.000	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Disnaker	jumlah bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja yang dapat disediakan	20 buah	25.000.000

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Disnaker	jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan, pelatihan perbengkelan mobil/motor Ds Badak (prioritas I hasil musrenbang), pelatihan las listrik desa Tambi Kec. Watukumpul (Prioritas I hasil musrenbang), pelatihan perbengkelan desa Pasir Kec Bodeh (Prioritas I hasil musrenbang), pelatihan montir sepeda motor desa Pedagung Kec. Bantarbolang (Prioritas I hasil musrenbang), kursus montir mobil desa Ambowetan Kec. Ulujami (Prioritas I hasil musrenbang)	400 peserta	1.250.000.000	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan	500 peserta	1.810.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	jumlah laporan monev yang tersusun	4 laporan	80.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	jumlah laporan monev yang tersusun	4	80.000.000
Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Disnaker	jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	1 paket	200.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Disnaker	jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	1 paket	200.000.000
Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Disnaker	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas pada 4 perusahaan	20 orang	120.000.000	Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Disnaker	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	20 orang	120.000.000
Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	38 perusahaan	45.000.000	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	38 perusahaan	45.000.000

Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	jumlah LPKS yang tersusun profilnya	38 LPKS	40.000.000	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Disnaker	jumlah LPKS yang tersusun profilnya	38	40.000.000
Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Disnaker	jumlah peserta peningkatan profesionalisme berbahasa jepang dan kesempatan	50 LPKS	120.000.000	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Disnaker	jumlah peserta peningkatan pelatihan bahasa Jepang dan Kesempatan		-
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnaker	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	88.23%	3.380.000.000	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Disnaker	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	88.23%	5.300.000.000
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Disnaker	jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	12 buku	45.000.000	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Disnaker	jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	16 buku	30.000.000
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Disnaker	jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001	3 kegt	500.000.000	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Disnaker	jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001:2015 dan Job Fair expo 2018	45 jenis	500.000.000
Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Disnaker	jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader	2.000 orang	190.000.000	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Disnaker	jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader	5100 orang	190.000.000

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	40 pokmas		Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan		Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	40 pokmas	
				130.000.000					130.000.000
Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Disnaker	Terlaksananya jumlah orang yang mendapatkan bantuan praktek,sarana usaha dan pelatihan	340 orang	1.355.000.000	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Disnaker	Terlaksananya jumlah orang yang mendapatkan bantuan praktek,sarana usaha dan pelatihan	700 orang	2.425.000.000
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	Jumlah laporan manev yang tersusun	4 dokumen	80.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Disnaker	Jumlah laporan manev yang tersusun	4 dokumen	80.000.000
Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	1 dokumen	70.000.000	Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah	Disnaker	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	1 dokumen	70.000.000
Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat	Disnaker	Terwujudnya kesempatan kerja yang tersedia	5.040 orang	1.000.000.000	Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat	Disnaker	Terwujudnya kesempatan kerja yang tersedia	5040 orang	1.000.000.000
Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Disnaker	Jumlah peserta bimtek Bursa Kerja Khusus(BKK)	100 orang	200.000.000	Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Disnaker	Jumlah peserta bimtek Bursa Kerja Khusus(BKK)	100 orang	200.000.000

Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Disnaker		70 orang		Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	Disnaker		70 orang	
				325.000.000					325.000.000
Pendataan angkatan kerja	Disnaker	Jumlah dokumen angkatan kerja	2 dokumen		Pendataan angkatan kerja	Disnaker	Jumlah dokumen angkatan kerja	2 dokumen	
				350.000.000					350.000.000
Program Perindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Disnaker	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	778 orang		Program Perindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Disnaker	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama(PB)	778 orang	
				1.035.000.000					1.070.000.000
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Disnaker	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	20 perusahaan		Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Disnaker	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	20 perusahaan	
				90.000.000					80.000.000
Fasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Disnaker	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	6 kasus		Pemberdayaan LKS tripartifasilitas penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Disnaker	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	6 kasus	
				40.000.000					40.000.000
Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	4 kasus		Fasilitas penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Disnaker	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	4 kasus	
				100.000.000					100.000.000

Sosialisasi berbaai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Disnaker	Sosialisasi UMK,Jamsostek Hubungan Industrial dan syarat kerja	100 orang	100.000.000	Sosialisasi berbaai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Disnaker	Sosialisasi UMK,Jamsostek Hubungan Industrial dan syarat kerja	200 orang	100.000.000
Pemberdayaan LKS tripartit	Disnaker	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan,sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	6 kali	200.000.000	Pemberdayaan LKS tripartit	Disnaker	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan,sinergitas data ketenagake	6 kali	200.000.000
Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi	Disnaker	jumlah SP/SB yang diverifikasi	15 pokmas	40.000.000	Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi	Disnaker	jumlah SP/SB yang diverifikasi	35 pokmas	40.000.000
Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan indstrial di perusahaan	Disnaker	Jumlah PK/PB/PKB yang tercatat,disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	6 kali	75.000.000	Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan indstrial di perusahaan	Disnaker	Jumlah PK/PB/PKB yang tercatat,disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	14 kali	75.000.000
Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Disnaker	jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	20 perusahaan	40.000.000	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Disnaker	jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	21 perusahaan	40.000.000
Pemberdayan dewan pengupahan	Disnaker	Jumlah rapat dewan pengupahan 1 bimtek dan studi banding dewan pengupahan	10 kali	385.000.000	Pemberdayan dewan pengupahan	Disnaker	Jumlah rapat dewan pengupahan 1 bimtek dan studi banding dewan pengupahan	10 kali	385.000.000
<u>Transmigrasi</u>	Disnaker			685.750.000	<u>Transmigrasi</u>	Disnaker			685.750.000
Program pengembangan wilayah transmigrasi	Disnaker	Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	210 dokumen	210.000.000	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Disnaker	Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	210 dokumen	210.000.000

Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Disnaker	Jumlah MOU pertahun	2 dokumen		Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Disnaker	Jumlah MOU pertahun	2 dokumen	
				110.000.000					110.000.000
Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Disnaker	Jumlah calon transmigrasi yang dikrimke lokasi	25 orang	100.000.000	Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Disnaker	Jumlah calon transmigrasi yang dikrimke lokasi	20 orang	100.000.000
Program trnsmigrasi umum	Disnaker	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum(PDU)	25 orang	475.750.000	Program trnsmigrasi umum	Disnaker	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum(PDU)	25 orang	475.750.000
Pelatihan transmigrasi regional	Disnaker	Jumlah calon tranmigrasi yang terdidik	100 orang	100.000.000	Pelatihan transmigrasi regional	Disnaker	Jumlah calon tranmigrasi yang terdidik	125 orang	100.000.000
Penyiapan data base calon transmigrasi	Disnaker	jumlah animo calon transmigrasi yang berminat berangkat transmigrasi	50 orang	50.000.000	Penyiapan data base calon transmigrasi	Disnaker	jumlah animo calon transmigrasi yang berminat berangkat transmigrasi	30 orang	50.000.000
Seleksi calon transmigrasi	Disnaker	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan dasar umum(PDU)	30 org	40.000.000	Seleksi calon transmigrasi	Disnaker	Jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan dasar umum(PDU)	2 lokasi	40.000.000
Pembinaan transmigrasi pasca penempatan	Disnaker	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi terfasilitasi	2 lokasi	215.750.000	Pembinaan Transmigran Pra Penempatan	Disnaker	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	215.750.000
Pembinaan Transmigrasi Pra Penempatan	Disnaker	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	70.000.000	Pembinaan Transmigrasi Pra Penempatan	Disnaker	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	70.000.000

2.5. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tahapan dalam proses pembangunan daerah adalah melalui Forum SKPD . Forum ini cukup strategis karena mempertemukan kelompok masyarakat sektoral dan spasial. Dalam forum ini dilakukan penyelarasan usulan antara hasil-hasil musrenbang Kecamatan dengan rencana kerja SKPD, serta memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi semua persoalan di semua sektor. Musrenbang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan sampai kabupaten. Kajian terhadap program /kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah pembangunan daerah terdiri dari prioritas I dan 2 serta pokok pikiran DPRD. Prioritas 1 merupakan kegiatan hasil musrenbang yang jelas terdani. Matriks Kegiatan Hasil Musrenbang dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 2.4
Usulan Para Pemangku Kepentingan/SKPD/Unit Kerja Tahun 2021
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				
	Kegiatan :				
	Program peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja				
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja		jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan, pelatihan perbengkelan mobil/motor, menjahit, las		
	(prioritas 2)	Kalisaleh			Perbengkelan
		Muncang			Bengkel Motor
		Pabuaran		20 org	Las
		Petanjungan		30 org	Perbengkeln Las
		Samong			Bengkel Motor
		Banjaran		20 org	Menjahit
		Kedungbanjar		20 org	Las Listrik
		Parunggalih		20 org	Perbengkelan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
		Sarwodadi		20 org	Las Listrik
		Gunungbatu		20 org	Ketrampilan Montir Mobil (refocusing)
					Bengkel Motor (refocusing)
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		Terlaksananya jumlah orang yang mendapatkan bantuan praktek,sarana usaha dan pelatihan		
	Kegiatan :				
	Pemberian fasilitas dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat (prioritas 1)	Banglarang- an		30 org	Menjahit
		Iser		50 org	Menjahit
		Simpur		20 org	Menjahit
		Kalirandu		50 org	Menjahit
		Jebed Utara		20 org	Menjahit
		Beji		20 org	Menjahit
		Kuta (Btrbolang)		20 org	Menjahit
		Purana		20 org	Menjahit
	(prioritas 2)	Kebanggan Gapura		1 paket	Tataboga
		Jatingarang		1 kelompk	Gapura
		Paguyangan		20 org	Menjahit
		Sumurkidan g		20 org	Menjahit
		Pegiringan Lodaya		20 org	Menjahit
		Gembyang		20 peserta	Tata boga
				20 peserta	Menjahit
		Kebondalem		65 org	Tataboga
		Danasari		1 paket	menjahit
		Saradan		1 kegt	menjahit
		Cibelok		20 org	Menjahit
		Wanarejan Selatan		25 org	Tataboga
		Gondang		25 org	Menjahit
		Panjunan		30 org	Menjahit
		Tegalmlati		20 org	Menjahit
		Sirangkang		25 org	Menjahit
		Kendaldoyon g		50 org	Menjahit
		Serang		20 org	Menjahit
		Karangasem		30 org	Menjahit
		Bulu		20 org	Menjahit
		Kel. Petarukan		100 org	Menjahit bersertifikat
		KLareyan		25 org	Menjahit
		Kendalrejo		25 org	Menjahit
		Nyamplung sari		20 org	Menjahit

N o	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1					
		Tegalsari barat		20 org	Tataboga (Pokir Dewan)
		Pasir		20 org	Menjahit (refocusing)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra (Rencana Strategis) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang yang secara substantif tidak berdiri sendiri, dokumen ini terkait dengan keberadaan dokumen perencanaan lainnya yang bersifat perencanaan program pembangunan. Oleh karena itu dalam penyusunannya memperhatikan dan mensinergikan dengan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis merupakan acuan untuk penyusunan Rencana Kerja setiap tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan jangka menengah Daerah kabupaten Pemalang.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas nasional tahun 2021 diarahkan pada;

- Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
- Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
- Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industry dan jasa produktif
- Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
- Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilihan umum

Dalam Renstra Kementrian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024 direncanakan ada delapan arah kedepan yang akan dilaksanakan :

1. Mengembangkan pasar terbuka bagi sektor-sektor pekerjaan yang bernilai tambah tinggi.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan adaptif terhadap teknologi, khususnya bagi milenial.
3. Pengembangan pusat-pusat pelatihan ketenagakerjaan(Lembaga Khusus/Komunitas bagi kelompok berpendidikan rendah).
4. Mengembangkan informasi pasar kerja yang terbuka serta menjangkau seluruh daerah serta potensi “demand” tenaga kerja.
5. Penguatkan Relevansi pendidikan dan dunia kerja baik dari kurikulum pendidikan, sarana dan prasarana, metode pembelajaran hingga sertifikasi keahlian.
6. Meningkatkan kualitas pekerja migrant Indonesia pada bidang dan keahlian tertentu serta pengembangan pasar baru PMI di luar negeri.
7. Peningkatan kuantitas dan kualitas hubungan industrial untuk menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik.
8. Peningkatan kapasitas pengawasan ketenagakerjaan untuk meningkatkan iklim ketenagakerjaan yang baik.

Adapun tema dan prioritas pembangunan Provinsi Jateng Tahun 2021 adalah Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan dan Pemanfaatan Iptek. Sedangkan Sasaran pembangunannya adalah :

➤ Pertumbuhan ekonomi	: 5,4-5,8 %
➤ Inflasi	: 3,0 ± 1 %
➤ PDRB/Kapasitas atas dasar harga berlaku (Juta/Rp)	: 41,15
➤ Kemiskinan	: 9,05-8,05 %
➤ Tingkat Pengangguran Terbuka	: 4,23 %

Untuk Kabupaten Pemalang di Tahun 2021 dengan program prioritas pembangunan daerah diarahkan pada peningkatan kualitas derajat sumber daya manusia berkualitas menuju pemalang sejahtera.

Dari prioritas tersebut dapat dicapai dengan sinergitas pembangunan nasional, Provinsi, dan Kabupaten serta masyarakat.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra PD ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang untuk mencapai Misi yang ke 3 Bupati "*Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan dengan berbasis sumber daya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan penganggur*" yaitu dengan :

Tujuan : Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran

Sasaran : Menurunnya tingkat pengangguran

1. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja
2. Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja.
3. Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri
4. Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga Kerja
5. Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi

No.	Permasalahan /Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan
I.	Bidang Tenaga Kerja			
	Masih tingginya angka pengangguran	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
			Meningkatnya akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja	Pengadaan sarana dan prasarana BLK
			Meningkatnya penempatan tenaga	Peningkatan

			kerja di dalam dan di luar negeri	profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK
				Penyusunan Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
				Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta
				Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
				Pendidikan dan pelatihan profesionalisme tenaga kerja
				Penyusunan database tenaga kerja daerah
				Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja
				Bimbingan program pemagangan ke luar negeri
				Peningkatan kesempatan kerja
				Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri
				Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat
				Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
				Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
				Penyiapan tenaga kerja siap pakai
				Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat
				Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus
	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan social tenaga kerja		Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

				Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan
				Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja
				Pengujian lingkungan kerja di perusahaan
				Fasilitasi pengujian peralatan di perusahaan
				Pemberdayaan LKS Tripartit
				Pemberdayaan dewan pengupahan
				Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian prselisihan hubungan industrial
				Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
				Pembinaan dan pemantauan kinerja organisasi
				Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan
				Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan
	Adanya pembatasan/kuota transmigran (ditentukan oleh Pusat);		Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi
	Belum optimalnya			Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku

	kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor pendukung urusan transmigrasi;			dan antar sektor dalam rangka pengemabangan kawasan transmigrasi
	penempatan dengan kesiapan daerah penempatan yang benar-benar sesuai kriteria;			Pengarahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM
				Transmigrasi Regional
				Pelatihan Transmigrasi Regional
				Penyiapan database calon transmigran
				Seleksi calon transmigran
				Pembinaan transmigran pascapenempatan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2021 yang diarahkan untuk peningkatan derajat sumber daya manusia berkualitas menuju Pemalang sejahtera, maka program dan kegiatan prioritas daerah selain dijabarkan ke dalam pelaksanaan urusan pemerintah juga ditekankan pada upaya-upaya antara lain : Peningkatan ketrampilan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar, penempatan tenaga kerja , peningkatan sarana BLK dan bursa kerja

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan merupakan penjabaran dari program kerja operasional yang dibuat oleh Instansi Pemerintah. Kegiatan ini berdimensi waktu 1 (satu) tahun.

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah ;

➤ Urusan Tenaga Kerja:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
 - e. Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - f. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - h. Penyediaan alat tulis kantor;
 - i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
 - k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
 - n. Penyediaan bahan logistik kantor;
 - o. Penyediaan makanan dan minuman;
 - p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah;
 - q. Penyediaan Jasa Keamanan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
 - a. Pembangunan Gedung Kantor;
 - b. Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
 - d. Pengadaan peralatan gedung kantor;
 - e. Pengadaan mebeleur;
 - f. Pengadaan komputer dan perlengkapannya;
 - g. Pengadaan alat-alat elektronik
 - h. Pengadaan lemari besi dan feling cabinet;

- i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
 - k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor;
 - l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor;
 - m. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur;
 - n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya;
 - o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik;
 - p. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja;
 - q. Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling cabinet;
 - r. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Peningkatan Disiplin Aparatur;
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
 - b. Pengadaan pakaian kerja lapangan
 - c. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
 4. Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur;
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.
 5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran;
 - c. penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
 6. Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD;
 - a. Penyusunan data base perencanaan SKPD;
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD.
 7. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - a. Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK;
 - b. Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja;
 - c. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja;
 - d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - e. Pengadaan sarana dan prasarana BLK;
 - f. Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja;
 - g. Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta;
 - h. Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta;
 - i. Bimbingan Program Pemagangan ke luar negeri.
 8. Peningkatan Kesempatan Kerja;

- a. Penyusunan informasi bursa tenaga kerja;
 - b. Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
 - c. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
 - d. Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
 - e. Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat;
 - f. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 - g. Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah
 - h. Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat;
 - i. Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus;
 - j. Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
 - k. Pendataan angkatan kerja
9. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- a. Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja;
 - b. Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - c. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan;
 - e. Pemberdayaan LKS Tripartit
 - f. Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi;
 - g. Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan;
 - h. Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan;
 - i. Pemberdayaan dewan pengupahan.
- Urusan Transmigrasi
1. Pengembangan wilayah transmigrasi;
 - a. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi;
 - b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.
 2. Transmigrasi Umum.
 - a. Pelatihan transmigrasi regional;
 - b. Penyiapan data base calon transmigran;
 - c. Seleksi calon transmigran;
 - d. Pembinaan transmigran pasca penempatan;

e. Pembinaan Transmigran Pra Penempatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan, indikator, penyebaran lokasi pelaksanaan kegiatan, target, indikatif anggaran serta prakiraan maju untuk tahun selanjutnya sebagaimana dalam tabel.

Tabel. 3.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
Kabupaten Pemalang**

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Urusan Wajib								
4.05	Dinas Tenaga Kerja								
4.05	Dinas Tenaga Kerja								
4.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	Pemalang	12 bulan	939.435.000	APBD		12 bulan	
4.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Pemalang	2500 srt 5 orang, 12 bulan	70.700.000			2500 srt 5 orang	88.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon,air, dan listrik selama 12 bulan	Pemalang	3 jenis,12 bulan	150.000.000			3 jenis,12 bulan	200.000.000
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhiselama 12 bulan	Pemalang	126 perlt	30.210.000			60 perlt	25.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	Pemalang	10 unit, mobil dan 29 unit sepeda	12.150.000			48 unit	20.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat	Pemalang	-	-			1 lap	30.000.000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	5 org,1 pkt	69.840.000			5 org,1 pkt	90.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	Pemalang	-	-			5 jenis	15.000.000
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	1 paket	35.080.000			1 paket	50.000.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	15 spanduk,6 jenis, 15.000 lbr	15.215.000			10 spanduk,9 jenis, 20.000 lbr	35.000.000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi komponen listrik/penerangan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	10 jenis/500 bh	10.000.000			10 jenis/500 bh	20.000.000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi selama	Pemalang	5 jenis	29.450.000			5 jenis	130.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12 tahun							
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	1 paket	8.055.000			1 paket	20.000.000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	2880 eks koran dan 6 buah buku	9.000.000			2880 eks koran dan 6 buah buku	15.000.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	35 tabung	6.040.000			35 tabung	10.000.000
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	3,000 dus, 105 galon , 560 kg,50 pak	26.800.000			3,000 dus, 105 galon , 560 kg,50 pak	75.000.000
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di	Pemalang	70 kali	408.815.000			70 kali	400.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	daerah	dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti							
	Penyediaan jasa keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi selama 12 bulan	Pemalang	8 org,12 bln	58.800.000			8 org,12 bln	120.000.000
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan			1.519.500.000				3.046.501.000
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang terbangun	Pemalang	1 unit	1.020.000.000			1 unit	1.751.501.000
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	Pemalang	3 unit	-			3 unit	100.000.000
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat	Pemalang	4 jenis	20.000.000			4 jenis	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terpenuhi							
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Pemalang	3 jenis	-			3 jenis	40.000.000
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	Pemalang	3 jenis	55.000.000			3 jenis	100.000.000
	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Pemalang	3 jenis	65.000.000			3 jenis	100.000.000
	Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang terpenuhi	Pemalang	4 jenis	-			4 jenis	50.000.000
	Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feeling kabinet yang terpenuhi	Pemalang	8 unit	15.000.000			8 unit	40.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	Pemalang	3 lokasi	35.000.000			3 lokasi	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	48 unit	70.000.000			48 unit	120.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	12 bulan	-			12 bulan	10.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung BLK yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	3 okasi	20.000.000			3 okasi	25.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeler	Jumlah mebeleur yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	12 bln	-			12 bln	5.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	12 bln	10.000.000			12 bln	20.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara selama	Pemalang	12 bln	-			12 bln	20.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		12 bulan							
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Jumlah prasarana BLK yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	4 buah	19.500.000			4 buah	30.000.000
	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	Pemalang	12 bln	-			12 bln	5.000.000
	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	Pemalang	3 lokasi kegiatan	190.000.000			3 lokasi kegiatan	500.000.000
	Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan ASN	Pemalang	100%	-			100%	75.000.000
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	Pemalang	50 stel	-			50 stel	25.000.000
	Pengadaan pakaian kerja	Jumlah pakaian kerja yang	Pemalang	50 stel	-			50 stel	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	lapangan	tersedia							
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pemalang	50 stel	-			50 stel	25.000.000
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase SDM Aparatur yang memiliki kompetensi			69.625.000				112.500.000
	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	50 orang	59.625.000			50 orang	82.500.000
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan	Pemalang	10 kali	10.000.000x			10 kali	10.000.000
	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	Pemalang	3 dokumen	41.178.000			3 dokumen	145.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun dengan baik dan benar	Pemalang	3 laporan	4.518.000				75.000.000
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Pemalang	1 dokumen	2.000.000			1 dokumen	10.000.000
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Pemalang	1 dokumen	2.000.000			1 dokumen	10.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	Pemalang	12 laporan	32.660.000			12 laporan	50.000.000
	Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia		100%				100%	
	Penyusunan Data base	Tersedianya data	Pemalang	1 dokumen	25.000.000			1 dokumen	80.000.000-

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Perencanaan SKPD	perencanaan							
	Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	Pemalang	6 dokumen	25.850.000			6 dokumen	80.000.000
	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis		6,93				6,93	1.970.000.000
	peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang menindkat kemampuannya	Pemalang	40 orang	-			40 orang	90.000.000
	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja yang dapat disediakan	Pemalang	20 buah	-			20 buah	25.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan	Pemalang	340 peserta dan 10 teaga kepelatihan	1.135.775.000			400 peserta	1.810.000.000
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	Pemalang	4 lap	-			4 lap	80.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	Pemalang	2 paket	242.615.000			1 paket	200.000.000
	Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	Pemalang	20 orang	-			20 orang	45.000.000
	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	jumlah LPKSyang dilakukan pengkuran kinerja	Pemalang	38 perusahaan	-			38 perusahaan	40.000.000
	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah LPKS ang tersusun profilnya	Pemalang	38 perusahaan	-			38 perusahaan	45.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Jumlah peserta peningkatan profesionalisme berbahasa jepang kesamaptaan	Pemalang	25 org	-			25 org	120.000.000
	Peningkatan Kesempatan kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		88,23%	1.873.375.000			88,23%	4.230.000.000
	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penyusun informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	Pemalang	16 buku	-			16 buku	30.000.000
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan, pendampingan ISO 9001:2015dan Job fair Expo 2018	Pemalang	45 jenis	273.650.000			45 jenis	500.000.000
	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapat	Pemalang	5100 orang	38.200.000			5100 orang	190.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		penyuluhan dan bimbingan tes leader							
	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan	Pemalang	40 pokmas	44.025.000			40 pokmas	130.000.000
	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	Pemalang	460 orang	804.250.000			340 orang	2.425.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	Jumlah terlaksananya kegiatan monev	Pemalang	4 dokumen	-			4 dokumen	80.000.000
	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	Pemalang	1 dokumen	33.850.000			1 dokumen	70.000.000
	Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat	terwujudnya kesempatan kerja yang tersedia	Pemalang	5040 orang	293.200.000			5040 orang	1.000.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Jumlah peserta Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pemalang	100 orang	22.400.000			100 orang	200.000.0000
	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri		Pemalang	70 orang	135.300.000			70 orang	325.000.000
	Pendataan angkatan kerja	Jumlah dokumen angkatan kerja	Pemalang	2 dokumen	228.875.000			2 dokumen	350.000.000
	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan		58 %	448.075.000			58 %	1.070.000.000
	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyaluran tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	Pemalang	20 perusahaan	26.400.000			20 perusahaan	90.000.000
	Fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	Pemalang	6 kasus	14.000.000			6 kasus	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenagakerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	Pemalang	4 kasus	29.600.000			4 kasus	100.000.000
	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi UMK, Jamsostek, Hubungan Industrial, dan syarat kerja	Pemalang	200 orang	38.475.000			200 orang	100.000.000
	Pemberdayaan LKS Tripartit	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan, sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	Pemalang	6 kali	113.775.000			6 kali	200.000.000
	Pembinaan dan pemantauan	Jumlah SP/SB	Pemalang	35 pokmas	24.000.000			35 pokmas	40.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	kinerja organisasi	yang diverifikasi							
	Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Jumlah PK/PB/PKB yang tercatat disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	Pemalang	14 kali	63.900.000			14 kali	75.000.000
	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah tenaga kerja outsourcing diperusahaan	Pemalang	21 perusahaan	24.000.000			21 perusahaan	40.000.000
	Pemberdayaan dewan pengupahan	Jumlah rapat dewan pengupahan 1 bimtek dan studi banding dewan pengupahan	Pemalang	10 kali	113.925.000			10 kali	385.000.000
	Transmigrasi								
	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi	210 orang						685.750.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelatihan transmigrasi regional	jumlah calon transmigrasi yang terdidik	Pemalang	50 orang	28.375.000			50 orang	100.000.000
	Penyiapan database calon transmigrasi	jumlah animo calon transmigrasi yang berminat berangkat transmigrasi	Pemalang	125 orang	-			125 orang	50.000.000
	Seleksi calon transmigran	jumlah calon transmigrasi yang mendapatkan pelatihan dasar umum(PDU)	Pemalang	30 orang	14.525.000			30 orang	40.000.000
	Pembinaan transmigran pascapenempatan	jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	Pemalang	2 lokasi	81.950.000			2 lokasi	215.750.000
	Pembinaan transmigran pra penempatan	jumlah kesiapan lokasi transmigrasi yang terfasilitasi	Pemalang	2 lokasi	-			2 lokasi	70.000.000
	Pengembangan Wilayah Transmigrasi								210.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah MoU pertahun	Pemalang	2 MOU	70.050.000				110.000.000
	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	Pemalang	25 KK	78.700.000				100.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan pasal 273 (3) Rencana kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rumusan rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021 sebagaimana tabel terlampir:

Tabel. 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

NO	TUJUAN Renstra	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	Rencana Tahun 2021 dan 2022				Lokasi
					2021		2022		
					Target (19)	Rp (20)	Target (21)	Rp (22)	
(1)	(3)	(6)	(7)	(19)	(20)	(21)	(22)		
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Pelayanan administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan Jumlah surat terkirim selama 12 bulan Jumlah tagihan telepon, air, dan listrik selama 12 bulan Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bln 2.500 srt,4 org 3 jenis,12 bulan 60 perlt	1.343 88 200 25	12 bln 2.500 srt,4 org 3 jenis,12 bulan 60 perlt	1413 88 200 25	Disna ker

			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	48 unit	20	48 unit	20	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat	1 lap	120	1 lap	120	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan peralatan kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	5 org, 1 pkt	90	5 org, 1 pkt	90	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	5 jenis	15	5 jenis	15	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bln	50	12 bln	50	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang terpenuhi selama 12 bulan	10 spanduk, 9 jenis, 20.000 lbr	35	10 spanduk, 9 jenis, 20.000 lbr	35	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi komponen listrik/penerangan kantor yang terpenuhi selama 12 bulan	10 jenis/50 0 bh	20	10 jenis/50 0 bh	20	
			Penyediaan peralatan	Jumlah peralatan dan	5 jenis	130	5 jenis	130	

			dan perlengkapan kantor	perlengkapan kantor yang terpenuhi selama 12 tahun					
			Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang terpenuhi selama 12 bulan	12 bln	20	12 bln	20	
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang terpenuhi selama 12 bulan	2880 eks koran dan 6 buah buku	15	2880 eks koran dan 6 buah buku	15	
			Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang terpenuhi selama 12 bulan	35 tabung	10	35 tabung	10	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang terpenuhi selama 12 bulan	3,000 dus, 105 galon, 560 kg, 50 pak	75	3,000 dus, 105 galon, 560 kg, 50 pak	75	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	70 kali	400	70 kali	400	
			Penyediaan jasa keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi selama 12 bulan	6 org, 12 bln	120	6 org, 12 bln	120	

			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan		3.046		2.294,9	
			Kegiatan : Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung yang terbangun	1 unit	1751,1	1 unit	1000	
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	3 unit	100	3 unit	100	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat terpenuhi	4 jenis	50	4 jenis	50	
			Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	3 jenis	40	3 jenis	40	

			Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	3 jenis	100	3 jenis	100	
			Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	3 jenis	100	3 jenis	100	
			Pengadaan alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang terpenuhi	4 jenis	50	4 jenis	50	
			Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feeling kabinet yang terpenuhi	8 unit	40	8 unit	40	
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	3 lokasi	80	3 lokasi	80	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara selama 12 bulan	48	120	48	120	
			Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	12 bulan	10	12 bulan	10	

			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung BLK yang dipelihara selama 12 bulan	2 unit komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1 set sound system, 1 wireless, 2 LCD proyektor, kamera digital dan AC	25	2 unit komputer, 2 unit laptop, 2 unit printer, 1 set sound system, 1 wireless, 2 LCD proyektor, kamera digital dan AC	25	
			Pemeliharaan rutin/berkala mebel	Jumlah mebel yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5	12 bln	5	
			Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20	12 bln	20	
			Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	20	12 bln	20	

Pemeliharaan rutin/berkala kerja peralatan	Jumlah prasarana BLK yang dipelihara selama 12 bulan	4 peralatan kejuruan	30	4 peralatan kejuruan	30
Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan feeling kabinet	Jumlah lemari besi dan feling kabinet yang dipelihara selama 12 bulan	12 bln	5	12 bln	5
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	3 lokasi	500	3 lokasi	500
Peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kedisiplinan ASN	50 stel	75	50 stel	75
Kegiatan: Pengadaan dinas pakaian beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	50 stel	25	50 stel	25
Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja yang tersedia	50 stel	25	50 stel	25
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	50 stel	25	50 stel	25
Peningkatan kapasitas aparatur sumber daya aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi	100	112,5	100	112,5
Kegiatan : Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	50 org	82,5	50 org	82,5

			Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan	10 kali	30	10 kali	30	
			Peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia	100	145	100	145	
			Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 lap	75	3 lap	75	
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 lap	10	1 lap	10	
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 lap	10	1 lap	10	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	12 lap	50	12 lap	50	
			Peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD Kegiatan :	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia	100	80	100	130	

			Penyusunan Data base Perencanaan SKPD	Tersedianya data perencanaan	1 dok	0	1 dok	50	
			Penyusunan Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	6 dok	80	6 dok	80	
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mengurangi angka pengangguran	Menurunnya tingkat pengangguran		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	6,87		6,87		
		Meningkatnya jumlah pencari kerja yang mendapat pelatihan kerja	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	78,68	1970	78,68	1970	
			Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan ketrampilan	400 peserta	1250	400 peserta	1250	
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev yang tersusun	4 lap	80			
			Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang dibutuhkan	1 paket	200	1 paket	200	
		Meningkatnya		Jumlah LPK yang terbina dan	40	0,00	40	40	

		akreditasi dan perijinan lembaga pelatihan kerja		berijin						
			Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	38tenaga/instruktur LPKS	90	40 tenaga/instruktur LPKS	90		
			Penyusunan Profil Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	jumlah LPKS yang tersusun profilnya	38 LPKS	40	38 LPKS	40		
			Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	38 LPKS	45	38 LPKS	45		
			Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang memperoleh sosialisasi produktifitas	20		20			
			Pendidikan dan pelatihan profesionalisme tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktifitas pada 4 perusahaan	20 tenaga kerja	120	20 tenaga kerja	120		
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja di dalam dan di luar negeri	Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja	Pencari kerja yang ditempatkan	76,66		76,66			
			Penyusunan database tenaga kerja daerah	Tersedianya data base tenaga kerja daerah	1 dokumen	0	1 dokumen	0		

			Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja yang dapat disediakan	20 buah	25	20 buah	25	
			Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Jumlah peserta peningkatan profesionalisme berbahasa jepang dan kesamaptaan	25 orang	120	25 orang	120	
			Peningkatan kesempatan kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	94,11	4.230	94,11		
			Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan ke luar negeri	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	3 kegt	325	75 org	325	
			Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	340 org	1.355	480 org	1.355	
				Prosentase jumlah tenaga kerja yang terserap	93		93		
			Penyusunan dan	Jumlah penyusunan dan	1 dokmn	70	0	70	

			Pengembangan Rencana Tenaga Kerja Daerah	pengembangan rencana tenaga kerja daerah yang tersedia					
			Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	12 lap	30	12 lap	30	
			Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan dan pendampingan ISO 9001	3 kegt	500	45 jenis, 1 paket, 1 paket	500	
			Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapatkan penyuluhan dan bimbingan tes leader	2.000 siswa	190	5600 siswa	190	
			Pelaksanaan kegiatan padat kerja darurat	Jumlah kesempatan kerja yang tersedia	5040 HOK	1.000	5040 HOK	1.000	
			Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Jumlah peserta Bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	100 org	200	100 org	200	
		Meningkatnya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja	Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	778	1055	778	1055	
			Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Terlaksananya sosialisasi UMK jamsostek, norma kerja	60		60		
					100 org	100	100 org	100	

				Rasio UMK terhadap KHL	100		100		
			Pemberdayaan LKS Tripartit	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan	6 kali, 10 kali, 12 kali, 6 kali/14 kec. dan 1 keg.	200	6 kali, 10 kali, 12 kali, 6 kali/14 kec. dan 1 keg.	200	
			Pemberdayaan dewan pengupahan	Jumlah survey KHL dan rapat dewan pengupahan	10 kali, 6 kali, 1 kali, 1 keg, 2 keg bimtek	385	10 kali, 6 kali, 1 kali, 1 keg, 2 keg bimtek	385	
			Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Angka perselisihan pengusaha-pekerja yang terfasilitasi	100		100		
			Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	20 lembaga	90	20 lembaga	90	

			Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	6 kasus perselisihan/pencegahan	40	6 kasus perselisihan/pencegahan	40	
			Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	4 kasus	100	4 kasus	100	
			Pembinaan dan pemantauan kinerja organisasi	Jumlah SP/SB yang terdaftar dan tercatat	15 SP/SB	40	15 SP/SB	40	
			Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Jumlah PP/PKB/LKS Bipartit yang terdaftar dan tercatat	6 persh	75	6 persh	75	
			Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah perusahaan outsourcing yang terdaftar dan tercatat	20 pershn	40	20 pershn	40	
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas program transmigrasi	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Jumlah MoU yang disusun bersama dengan wilayah transmigrasi		210		210	

			Peningkatan kerjasama antar wilayah antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengemabangan kawasan transmigrasi	jumlah MOU pertahun	2 MOU	110	2 MOU	110	
			Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuh an SDM	jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	25 KK	100	25KK	100	
			Transmigrasi Umum	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)	25	475,75	25	475,75	
			Pelatihan Transmigrasi	jumlah calon transmigrasi yang terdidik	100 org	100	50 org	100	
				Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi	25		25		
			Penyiapan database calon transmigran	jumlah animo calon transmigrasi yang berminat berangkat transmigrasi	100 KK	50	125 KK	50	
			Seleksi calon transmigran	jumlah calon transmigrasi yang diseleksi	100 KK	40	30 KK	231,25	

			Pembinaan transmigran pascapenempatan	jumlah kesiapan lokasi transmigrasi dan yang terfasilitasi	2 lokasi	215,75	2 lokasi	215,75	
			Pembinaan transmigran pra penempatan	jumlah kesiapan lokasi transmigrasi yang terfasilitasi	2 lokasi	70	2 lokasi	70	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang merupakan dokumen rencana pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2021 disusun berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 dan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahun 2021.

Kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang, dan jabatan fungsional pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang agar mendukung pencapaian Kinerja dalam Rencana Kerja 2021 dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Renja (Rencana Kerja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang memuat sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Program dan kegiatan yang dilaksanakan sifatnya masih **indikatif** sehingga harus disesuaikan dengan pembiayaannya/anggaran yang tersedia.
3. Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang tahun 2021 ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan RKA maupun DPA untuk tahun yang akan datang.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan yang ada dalam Renja.
5. Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang Tahun 2021 dimungkinkan terjadi perkembangan dan dinamika pembangunan yang harus diakomodir. Sebagai konsekuensinya, diperlukan langkah-langkah

penyesuaian terhadap Renja Dinas Tenaga Kerja 2021 yang akan terwujud dalam Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pemalang 2021.

Pemalang, 18 Agustus 2020

**KEPALA DINAS , TENAGA KERJA
KABUPATEN PEMALANG**



LAMPIRAN

MAPPING PROGRAM KEGIATAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019

KABUPATEN : PEMALANG

PERANGKAT DAERAH : Dinas Tenaga Kerja

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Keluaran (Output)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	PROGRAM	KODE	
3	4	5	7						
	Dinas Tenaga Kerja								
	Tenaga Kerja								
	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01	
	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat terkirim selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.01
	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan telepon, air, listrik selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.02
	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan perlengkapan kantor yang ada selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.03
	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah yang dipelihara dan berijin selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.06
	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah laporan keuangan yang tersusun tepat	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.07
	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhi selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.08
	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.09
	1	#	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat kantor yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat Tulis kantor yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.10

	1	#	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.11
	1	#	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.12
	1	#	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.13
	1	#	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.14
	1	#	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan-undangan yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan-undangan yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.15
	1	#	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.16
	1	#	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.17
	1	#	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri/diikuti	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah rapat dan konsultasi yang dapat dihadiri/diikuti	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.18
	1	#	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	jasa keuangan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01
	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional roda 4 dan roda 2 yang terpenuhi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.20
	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.22
	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.24
	2	#	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebelair yang terpenuhi	Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebelair yang terpenuhi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.25

	2	#	Pengadaan komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat terpenuhi	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.24
	2	#	Pengadaan alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.24
	2	#	Pengadaan lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang terpenuhi	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.22
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.28
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.30
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.32
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah prasarana gedung BLK yang terpelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah prasarana gedung BLK yang terpelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.34
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebelair yang dipelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebelair yang dipelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.35
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.34
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah alat-alat elektronik yang dipelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.34
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja	Jumlah prasarana BLK yang terleihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah prasarana BLK yang terleihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.34
	2	#	Pemeliharaan rutin/berkala lemari besi dan felling cabinet	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah lemari besi dan felling cabinet yang dipelihara selama 12 bulan	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.32
	2	#	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah gedung yang direhab	Administrasi Umum		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.03.38
	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kediplinan ASN					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01
	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.04.02
	3	3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja yang tersedia	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja yang tersedia	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.04.03

	3	5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang tersedia	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.04.05
		5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM aparatur yang memiliki kompetensi					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01
		5	2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.04.10
		5	3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimtek yang diikuti dan pelatihan	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.04.11
		6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01
		6	1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.02.06
		6	2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.02.07
		6	4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	Administrasi Keuangan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.02.09
		6	9 Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan money yang tersusun	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan money yang tersusun	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01.05
		9	Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01
		9	2 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.07.01.2.01.01
		#	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03
		#	4 Peningkatan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur BLK	Jumlah peserta tenaga pelatihan dan instruktur BLK yang meningkat kemampuannya	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	Jumlah peserta tenaga kepelatihan dan instruktur LPK yang meningkat kemampuannya	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.03.01

	#	5	Pengadaan bahan dan materi pendidikan dan ketrampilan kerja	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja yang dapat disediakan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah bahan dan materi pendidikan dan keterampilan kerja yang dapat disediakan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.01
	#	6	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.01
	#	#	Pengadaan sarana dan prasarana BLK	Jumlah sarana dan prasarana BLK yang terpenuhi	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	jumlah sarprasana lembaga pelatihan yang terfasilitasi				
	#	#	Pendidikan dan pelatihan peningkatan profesionalisme tenaga kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pengukuran produktivitas	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.05.01
	#	#	Penilaian kinerja lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dilakukan pengukuran kinerja	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.05.01
	#	#	Penyusunan profil lembaga pelatihan kerja swasta	Jumlah LPKS yang tersusun profilnya	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang tersusun profilnya	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02.01
	#	#	Bimbingan program pemagangan ke luar negeri	Jumlah peserta peningkatan pelatihan bahasa Jepang dan Kesamaptaan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah peserta pendidikan dan keterampilan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.01
	#		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04
	#	1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah penyusunan informasi bursa tenaga kerja yang didistribusikan	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03.02
	#	2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan, Pendampingan ISO 9001:2015 dan Job Fair Expo 2018	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah lowongan kerja yang tersebarluaskan, Pendampingan ISO 9001:2015 dan Job Fair Expo 2018	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03.03

	#	4	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah siswa kelas XII yang mendapat penyuluhan dan bimbingan tes leader	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah siswa kelas XII yang mendapat penyuluhan dan bimbingan tes leader	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.03
	#	5	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga yang diberikan pelatihan kewirausahaan	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02.01
	#	6	Pemberian fasilitasi dan mendorong sistem pendanaan pelatihan berbasis masyarakat	Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya jumlah orang yang mendapat bantuan praktek, sarana usaha dan pelatihan	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01.01
	#	8	Penyusunan dan pengembangan rencana tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja daerah yang tersusun	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01.01
	#	#	Pendampingan pengelolaan unit bursa kerja khusus	Jumlah peserta bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah peserta bimtek Bursa Kerja Khusus (BKK)	Pelayanan Antarkerja di Daerah		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01.01
	#	#	Peningkatan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri	-	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04.01
	#	#	Pendataan angkatan kerja	Jumlah dokumen angkatan kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen angkatan kerja	Penyusunan Rencana Tenaga		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01.01
	#		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)						
	#	1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah lembaga penyalur tenaga kerja yang di bina	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.02.02
	#	2	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus yang masuk dan dapat diselesaikan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.02

	#	3	Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah permasalahan dan penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan tenaga kerja AKAD yang mendapat perlindungan hukum	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.03
	#	4	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Sosialisasi UMK, Jamsostek, Hubungan Industrial dan syarat Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Sosialisasi UMK, Jamsostek, Hubungan Industrial dan syarat Kerja	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.03
	#	9	Pemberdayaan LKS tripartit	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan, sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat LKS Tripartit dan deteksi dini perusahaan, sinergitas data ketenagakerjaan dan mayday	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.04
	#	#	Pembinaan dan pemantauan dan kinerja organisasi	Jumlah SP/SB yang diverifikasi	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta non afiliasi	Jumlah SP/SB yang diverifikasi	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.03
	#	#	Pembinaan dan pemantauan pembentukan sarana hubungan industrial di perusahaan	Jumlah PK/PB/PKB yang tercatat, disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah PK/PB/PKB yang tercatat, disahkan dan didaftarkan serta LKS Bipartit yang dibentuk	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.01
	#	#	Pembinaan dan pendataan tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah tenaga kerja outsourcing di perusahaan	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01.03
	#	#	Pemberdayaan dewan pengupahan	Jumlah rapat dewan pengupahan, 1 bimtek dan studi banding dewan pengupahan	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rapat dewan pengupahan, 1 bimtek dan studi banding dewan pengupahan	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02.04

			Transmigrasi						
	#		Program pengembangan wilayah transmigrasi	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi					
	#	2	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah MOU pertahun	Koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah kabupaten/kota	Jumlah koordinasi kerjasama	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.04
	#	5	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi Kebutuhan SDM	Jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah transmigran yang dikirim ke lokasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.04
	#		Program transmigrasi umum	Jumlah calon transmigran yang mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU)					
	#	2	Pelatihan transmigrasi regional	Jumlah calon transmigran yang terdidik	Pelatihan Transmigrasi lokal	Jumlah calon transmigran yang terdidik	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.06
	#	3	Penyiapan data base calon transmigran	Jumlah animo calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah calon transmigran yang berminat berangkat transmigrasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
	#	4	Seleksi calon transmigran		Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah calon transmigran yang diseleksi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.04
	#	5	Pembinaan transmigran pasca penempatan	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tranmigran yang mendapatkan pembinaan	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		
	#	6	Pembinaan Transmigran Pra Penempatan	Jumlah kesiapan lokasi transmigrasi yang terfasilitasi	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah calon tranmigran yang difasilitasi	Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI 3.32.03.2.01.01